

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester I 2025 (30 Juni 2025)



JL. DIPONEGORO - MAUMERE
SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615
Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514
e-mail : pa.maumere@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Untuk Periode Semester I TA.2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun & menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan & kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun & disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,
JUFRI ENDO, S.H.I.
NIP.19710421 199603 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi.....	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	50
B.2. Belanja	50
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
C.1. Aset Lancar.....	51
C.2. Aset Tetap.....	52
C.3. Aset Lainnya	54
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	55
C.6. Ekuitas	57
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	57
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	57
D.2. Beban Pegawai	57
D.3. Beban Persediaan	58

D.4. Beban Barang dan Jasa	59
D.5. Beban Pemeliharaan	59
D.6. Beban Perjalanan Dinas	60
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	60
D.8. Beban Bantuan Sosial	60
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	61
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	61
D.11. Beban Lain-lain	62
D.12. Kegiatan Non Operasional	62
D.13. Pos Luar Biasa	63
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
E.1. Ekuitas Awal	63
E.2. Surplus (defisit) LO	63
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset	63
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan	63
E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	64
E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	64
E.3.5 Koreksi Lain-lain	64
E.4. Transaksi Antar Entitas	64
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	65
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	65
E.5. Ekuitas Akhir	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	65
F.2. Pengungkapan Lain-lain	65
Daftar dan Lampiran	67
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	68
Daftar Hibah Langsung	71

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

RINGKASAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, & Catatan atas Laporan Keuangan per Semester I (30 Juni 2025) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, & isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran & posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.H.I.
NIP.19710421-199603-1-002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, & Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) & berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp948,918 atau mencapai 52 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1,838,000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,336,919,468 atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp2,787,453,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per Semester I (30 Juni 2025).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp9,352,231,178 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp19,858,153; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp9,332,373,025; Piutang Jangka Panjang (netto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; & Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp165,205,270 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp165,205,270 & Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp9,187,025,908.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, & surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,007,071 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1,607,520,959 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1,606,513,888), Kegiatan Non Operasional & Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp0 & surplus (defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar (Rp1,606,513,888).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp9,457,569,246 ditambah surplus (defisit)-LO sebesar (Rp1,606,513,888) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 & ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1,335,970,550 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp9,187,025,908.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, & Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 Dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	Catatan	30 Juni 2025			30 Juni 2024	
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,838,000	948,918	52	784,368	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,838,000	948,918	52	784,368	
B. Belanja Negara	B.2					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	1,735,893,000	946,683,468	55	866,759,539	
2. Belanja Barang	B.2.2.	1,051,560,000	390,236,000	37	424,153,494	
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0	
Jumlah Belanja Negara		2,787,153,000	1,336,919,468	47	1,290,913,033	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpindahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

NERACA

per 30 Juni 2025 Dan 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	19,800,000	19,800,000
Plutang Bukan Pajak	C.1. 2.	58,153	58,153
Plutang Bukan Pajak (Netto)	C.1. 3.	58,153	58,153
	Jumlah Aset Lancar	19,858,153	19,858,153
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	4,045,410,000	4,045,410,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,970,178,446	2,952,048,443
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,229,115,000	6,229,115,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	25,401,979	25,401,979
Konstruksi dalam Penggerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,937,732,400)	(3,563,456,544)
	Jumlah Aset Tetap	9,332,373,025	9,690,518,878
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	4,510,000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	271,739,247	262,389,250
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(276,249,247)	(266,899,250)
	Jumlah Aset Lainnya	0	0
	Jumlah Aset	9,352,231,178	9,710,377,031
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.S. 1.	134,307,270	112,416,599
Utang yang Belum Ditagihkan	C.S. 2.	11,098,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.S. 3.	19,800,000	19,800,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		165,205,270	132,216,599
Jumlah Kewajiban		165,205,270	132,216,599

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar	C.6	9,187,025,908	9,578,160,432
Jumlah Ekuitas Dana		9,187,025,908	9,578,160,432
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9,353,231,179	9,710,377,031

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
per 30 Juni 2025 Dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1,007,071	842,521
Jumlah Pendapatan		1,007,071	842,521
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,066,724,738	950,785,164
Beban Persediaan	D. 3	13,304,000	8,076,000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	246,222,640	241,286,994
Beban Pemeliharaan	D. 5	117,740,000	75,278,500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	37,305,500	112,374,000
Beban Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	128,224,081	128,490,186
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		1,607,520,959	1,516,290,844
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1,606,513,888)	(1,515,448,323)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(1,606,513,888)	(1,515,448,323)
Pos Luar Biasa	D. 13	0 0
Pendapatan PNBP	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(1,606,513,888)	(1,515,448,323)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
per 30 Juni 2025 Dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ekuitas Awal	E. 1	9,457,569,246	9,674,989,904
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1,606,513,888)	(1,515,448,323)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1,335,970,550	1,290,128,665
RENAKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(270,543,338)	(225,319,658)
Ekuitas Akhir		9,187,025,908	9,449,670,246

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Maumere

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
4. Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan & keprotokolan, humas, & keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, & pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan & operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, & aset lainnya untuk penyusunan neraca & laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan & penyajian Neraca, Laporan Operasional, & Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan & penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu & dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan & penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, & praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, & tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan & tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi & Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, & tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja & selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja & selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi & fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, & Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Pengelolahan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

- lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Infrastruktur	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, & piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), & kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus & nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Pengelolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Izin, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahanan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek & kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, & Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp948,918

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp948,918 atau mencapai 52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,838,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Bincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	1,838,000	948,918	52
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekutuan/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		1,838,000	948,918	52

Adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan pada 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung dan bangunan.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 JUNI 2024	Persentase :
		Rp.	Rp.	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	948,918	784,368	164,550 21
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekutuan/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		948,918	784,368	164,550 21

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
: Rp1,336,919,468

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,336,919,468 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48% dari

- anggaran senilai Rp2,787,453,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

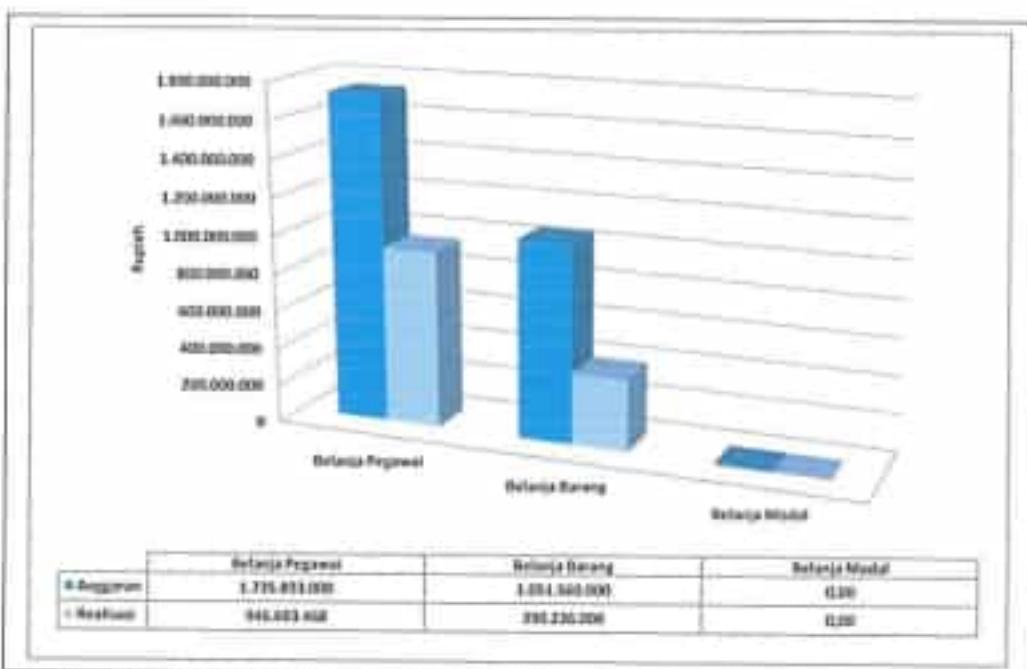
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025		
	Ragu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,735,893,000	946,683,468	54
Belanja Barang	1,051,560,000	390,236,000	37
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	2,787,453,000	1,336,919,468	48
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	2,787,453,000	1,336,919,468	48

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntensi Instansi Berbasis Akrual (SAIBAJ) 2025 & 2024



Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2025 & 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Perbedaan	Nilai (Rupiah)	%
	Ragu	Realisasi			
Belanja Pegawai	946,683,468	866,759,539	79,923,929	79,923,929	8
Belanja Barang	390,236,000	424,153,494	(33,917,494)	(33,917,494)	(8)
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Total Belanja	1,336,919,468	1,290,913,033	46,006,435	46,006,435	4

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
946,683,468

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp946,683,468 & Rp866,759,539. Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 9.221 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	329,685,740	329,493,800	18,191,940	0.09
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,094	6,342	(2,248)	(35.44)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	22,888,790	22,882,950	5,840	0.025
Belanja Tunj. Anak PNS	6,834,988	5,733,104	1,101,884	19.22
Belanja Tunj. Struktural PNS	10,690,000	12,160,000	(1,470,000)	(12.09)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,130,000	381,200,000	(363,080,000)	(94.98)
Belanja Tunj. PPh PNS	2,638,690	63,611,975	(58,975,285)	(95.72)
Belanja Tunj. Beras PNS	17,887,740	36,511,760	1,375,880	7.63
Belanja Uang Makan PNS	31,972,000	28,830,000	3,142,000	10.98
Belanja Tunjangan Umum PNS	4,030,000	4,030,000	0	0
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	24,300,000	24,300,000	0	0
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	70,928,466	0	70,928,466	100
Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	400,000,000	0	400,000,000	100
Total Belanja Brutto	946,683,468	866,759,539	79,923,929	9.22
Pengembalian Belanja	0	392	(392)	(100)
Total Belanja Netto	946,683,468	866,759,539	79,923,929	9.22

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp
390,236,000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp390,236,000 & Rp424,153,494.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 7.996 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Barang Operasional
2. Penurunan Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025		Perubahan (Naik/Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	123,046,500	225,622,494	(102,575,994)	(45.46)
Belanja Barang Non Operasional	700,000	0	700,000	100
Belanja Jasa	122,242,500	6,731,500	115,509,000	1,715.4
Belanja Pemeliharaan	109,381,500	89,905,000	39,436,500	55.44
Belanja Perjalanan Dinas	34,885,500	112,374,000	(77,488,500)	(68.35)
Total Belanja Brutto	390,236,000	424,153,494	(33,917,494)	(7.996)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	390,236,000	424,153,494	(33,917,494)	(7.996)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal : Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 & Rp0.

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025		Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp

19,858,153

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19,858,153 & Rp19,858,153.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Masing	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	19,800,000
Piutang Bukan Pajak	58,153	58,153
Total Aset Lancar	19,858,153	19,858,153

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp19,800,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19,800,000 & Rp19,800,000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, & dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	19,800,000
	Jumlah	19,800,000	19,800,000

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak:
Rp58,153

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp58,153 & Rp58,153.

Piutang Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Tenis.	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Piutang Bukan Pajak	58,153	58,153
	Jumlah	58,153	58,153

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap: Rp 9,458,597,106
Rp 9,690,518,878. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Perubahan (positif/minus)
1	Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,970,178,448	2,952,048,443	18,130,005
3	Gejung dan Bangunan	6,225,115,000	6,229,115,000	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979	0
	Jumlah	13,270,105,425	13,233,975,422	18,130,003
	Akumulasi Penyusutan	(3,811,508,319)	(3,561,456,544)	(250,051,775)
	Jumlah Aset Tetap	9,458,597,106	9,690,518,878	(231,921,772)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp 4,045,410,000
Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,045,410,000 & Rp4,045,410,000. Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,045,410,000 & Rp4,045,410,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Aset Name	Peruntukan	Jumlah
1	1	272	Hak Pakai Nomor 608	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	250,876,000	
2	3	750	Hak Pakai Nomor 318	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	691,754,000	
3	4	3,840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	3,102,780,000	
				Jumlah	4,045,410,000	

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2,952,048,443

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2,970,178,446 & Rp2,952,048,443.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	10 Juni 2023
	Peralatan dan Mesin	2,970,178,446	2,952,048,443
	Jumlah	2,970,178,446	2,952,048,443

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 6,229,115,000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6,229,115,000 & Rp6,229,115,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,229,115,000
	Jumlah	6,229,115,000	6,229,115,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya : Rp 25,401,979

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, serta jalan, irigasi, & jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp25,401,979 & Rp25,401,979.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	10 Juni 2024
	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	25,401,979
	Jumlah	25,401,979	25,401,979

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : **Rp(3,811,508,319)** Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp(3,811,508,319) & Rp(3,561,456,544).

- 23) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan & Mesin	2,970,178,446	(2,754,451,241)	215,727,205
2	Gedung & Bangunan	6,229,115,000	(1,857,857,078)	5,172,057,922
3	Jalan, Irigasi, & Jaringan	0	(0)	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	(0)	25,401,979
	Jumlah:	9,224,695,425	(3,811,508,319)	5,413,187,106

Aset Lainnya:
Rp0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 & Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
2	Aset Lain-lain	271,739,347	262,389,250
3	Aset Lainnya yang belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	276,249,347	266,899,250
	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(276,249,347)	(266,899,250)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud : Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4,510,000 & Rp4,510,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian Aset tak berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Aset Tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
	Jumlah	4,510,000	4,510,000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun 2025.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp271,739,247 & Rp262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2025	271,739,247
Mutasi Tambah	9,348,997
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2024	262,389,250

Asset lain-lain merupakan barang milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp165,205,270 & Rp152,220,147. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Utang kepada Pihak Ketiga	134,307,270	122,416,599
2	Utang yang Belum Ditagihkan	11,098,000	4,489,000
3	Uang Muka dari KPPN	19,800,000	19,800,000
	Jumlah	165,105,270	152,226,599

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp134,307,270

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp134,307,270 & Rp122,416,599. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar & merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Utang kepada Pihak Ketiga	134,307,270	122,416,599
	Jumlah	134,307,270	122,416,599

C.5.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang
Belum
Ditagihkan:
Rp11,098,000

Jumlah utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp11,098,000 & Rp4,489,000.

Adapun rincian utang yang belum ditagihkan Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Utang yang Belum Ditagihkan	11,098,000	4,489,000
	Jumlah	11,098,000	4,489,000

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp19,800,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19,800,000 & Rp19,800,000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada

di kelompok akun Aset Lancar.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
	Uang Muka dari KPPN	19,800,000	19,800,000
	Jumlah	19,800,000	19,800,000

C.6. Ekuitas

Cadangan
Pertama:
Rp
9,187,025,908

Ekuitas per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,187,025,908 & Rp9,578,160,432. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2025 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar (Rp270,543,338) atau sebesar (3) persen dari nilai per TA 2024. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp9,187,025,908, sedangkan per TA 2024 tercatat sebesar Rp9,457,569,246.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP /
Rp1,007,071

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1,007,071 & Rp842,521. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Urutan	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penggunaan Sarana & Prasarana sesuai dengan Tusi	1,838,000	1,007,071	54,79
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Perselisih/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		1,838,000	1,007,071	54,79

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp
1,066,724,738

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,066,724,738 & Rp963,672,923. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pakak PNS	388,686,780	388,385,500	20,301,280	5.51
Beban Pembulatan Gaji PNS	4,783	5,476	(693)	(12.65)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25,839,910	25,510,880	329,030	(1.29)
Beban Tunj. Anak PNS	7,694,432	6,432,614	1,255,818	19.50
Beban Tunj. Struktural PNS	12,210,000	13,680,000	1,470,000	10.74
Beban Tunj. Fungsional PNS	20,385,000	332,250,000	(371,865,000)	(94.80)
Beban Tunj. PPh PNS	2,636,600	64,472,584	(61,835,984)	(95.91)
Beban Tunj. Beras PNS	20,250,020	18,467,100	1,882,920	10.20
Beban Uang Makan PNS	31,972,000	28,830,000	3,142,000	12.56
Beban Tunjangan Umum PNS	1,285,000	4,395,000	(3,110,000)	(70.76)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	28,350,000	28,350,000	0	0
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	77,310,123	0	77,310,123	100
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	450,000,000	0	450,000,000	100
Total Beban Brutto	1,066,724,733	950,785,164	115,939,574	12.19
Pengembalian Beban	0	0	0	0
Total Beban Netto	1,066,724,733	950,785,164	115,939,574	12.19

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp13,304,000

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13,304,000 & Rp8,076,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	13,304,000	8,076,000	5,228,000	64.73
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Lenges	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	13,304,000	8,076,000	5,228,000	64.73

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jasa:
Rp246,222,640

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp246,222,640 & Rp241,286,994. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Pekantaran	215,458,000	205,309,994	10,148,006	4,943
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	231,500	560,500	(329,000)	(58,70)
Beban Honor Operasional Setiwa Kerja	14,850,000	20,180,000	(5,330,000)	(26,50)
Beban Operasional Lainnya	583,000	583,000	0	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomputer	700,000	0	700,000	100
Beban Sewa	7,817,000	9,518,500	(1,701,500)	(17,87)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,166,140	5,135,000	31,140	0,606
Total Beban Barang dan Jasa:	246,222,640	241,286,994	4,935,646	2,045

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp117,740,000

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp117,740,000 & Rp75,278,500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,744,000	11,528,500	14,215,500	123,3
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,646,000	41,781,500	(4,135,500)	9,90
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	52,163,000	16,595,000	35,568,000	214,3
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2,187,000	5,373,500	(3,186,500)	(59,30)
Total Beban Pemeliharaan:	117,740,000	75,278,500	42,461,500	56,40

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp37,305,500

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37,305,500 & Rp112,374,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Bisnis	37,305,500	112,374,000	(75,068,500)	-66,80
Total Beban Perjalanan Dinas	37,305,500	112,374,000	(75,068,500)	-66,80

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial

Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah)					
Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%	
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0	
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0	

D.9. Beban Penyusutan & Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp126,224,081

Jumlah Beban Penyusutan & Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp126,224,081 & Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah)					
Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50,720,004	0	50,720,004	100	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75,504,077	0	75,504,077	100	
Jumlah Penyusutan	126,224,081	0	126,224,081	100	
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0	
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0	
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	126,224,081	0	126,224,081	100	

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lainBeban Lain-lain
: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan NonoperasionalBeban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Urutan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0

Total Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan & beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Nilai (Tahun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,457,569,246 & Rp9,647,989,904.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(1,606,513,888) & Rp(1,386,958,137). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, & pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 & Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Urutan	Koreksi
Barang Konsumsi		0
Suku Cadang		0
Barang Persediaan Lainnya		0
Total Koreksi Nilai Persediaan		0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Nonrevaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 & Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, & utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Urutan	Koreksi
Koreksi Beban		0
Koreksi Pendapatan		0
Koreksi Piutang		0
Koreksi Kewajiban		0
Koreksi hibah		0
Jumlah		0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,335,970,550 & Rp1,290,128,665.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(948,918)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,336,919,468
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	1,335,970,550

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp(948,918), sedangkan DKEL sebesar Rp1,336,919,468.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas. Pada Periode hingga 30 Juni 2025, Transfer Masuk & Transfer Keluar sebesar Rp0 & Rp0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,187,025,908 & Rp9,578,160,432.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan 5-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021
2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. 5-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. 5-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Angaran : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Pembuat Komitmen : Jufri Endo, S.H.I.

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Abdullah Muhammad, S.M.

Bendahara : Andi Abellia Reza, A.Md.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Maumere
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Aset Tetap	Kode Buku	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku
				Saldo Awal	Nilai Penyusutan	Total	
	A. Tanah		4,882	4,845,410,000	0	0	4,845,410,000
1.	Tanah Persil		4,882	4,845,410,000	0	0	4,845,410,000
	B. Peralatan dan Mesin		354	1,911,540,003	(2,517,707,795)	(80,167,632)	(2,580,875,337)
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	390,018,828	(390,018,828)	0	(390,018,828)	0
2.	Alat Kantor	79	283,789,000	(283,789,000)	0	(283,789,000)	0
3.	Alat Rumah Tangga	192	1,132,321,798	(1,132,375,986)	8,999,998	(1,110,375,988)	21,945,810
4.	Alat Studio	5	67,817,820	(40,976,910)	0	(40,976,910)	26,840,910
5.	Alat Komunikasi	2	12,129,700	(12,129,700)	0	(12,129,700)	0
6.	Peralatan Pemancar	3	152,880,000	(100,699,999)	349,999	(100,350,000)	52,500,000
7.	Komputer Unit	51	686,335,910	(605,884,175)	0	(605,884,175)	80,451,735
8.	Peralatan Komputer	23	244,915,390	(210,926,640)	0	(210,926,640)	33,988,750
	C. Gedung dan Bangunan		4	6,229,115,000	(1,027,087,038)	0	(1,027,087,038)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	5,006,257,000	(880,666,408)	0	(880,666,408)	4,145,590,592
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	785,775,000	(129,421,788)	0	(129,421,788)	656,353,232
3.	Tugu/Tanda Batas	2	437,083,000	(66,968,902)	0	(66,968,902)	370,114,098
	D. Aset Tetap Lainnya		463	25,401,979	0	0	25,401,979
1.	Barang Perpustakaan Tertetap	463	25,201,979	0	0	0	25,201,979
2.	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2	200,000	0	0	0	200,000
	E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		187	271,739,243	(262,389,250)	(8,349,997)	(271,739,257)
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	5,118,000	(5,118,000)	0	(5,118,000)	0
2.	Alat Kantor	35	29,723,000	(29,723,000)	0	(29,723,000)	0

3.	Alat Rumah Tangga	73	65,347,248	(56,347,250)	(8,999,998)	(65,347,248)	0
4.	Alat Studio	2	20,800,000	(20,800,000)	0	(20,800,000)	0
5.	Alat Komunikasi	11	21,367,000	(21,367,000)	0	(21,367,000)	0
6.	Peralatan Pemanca	3	5,224,999	(4,875,000)	(349,999)	(5,224,999)	0
7.	Komputer Unit	9	71,700,000	(71,700,000)	0	(71,700,000)	0
8.	Peralatan Komputer	12	52,009,000	(52,009,000)	0	(52,009,000)	0
9.	Peralatan Olah Raga	1	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
	Jumlah	3,343	11,941,848,672	(4,083,247,598)	0	(4,083,247,598)	9,858,597,074

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Maumere
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2025

No.	Nama Pemohon Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nisai Hibah	Sudah Disalurkan	Belum Disalurkan	
						No.	Alasan
1							
2		Human					